eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 789-804
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

PERAN UNITED *NATIONS OF COTE D'IVOIRE* (UNOCI) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PANTAI GADING 2010-2011

Yogi Nanda Fitriandi[1]
Nim. 1102045024

Abstract

This article intended to explain the roles of UNOCI in Conflict resolution post the elections of Cote D'Ivoire 2010. The roles taken up by UNOCI in three phases of conflict resolution was able to minimize the intensity of the conflict. In the peacekeeping phase, UNOCI intervened militarily in securing the conflict situation. In the peacemaking phase, UNOCI mediates the conflicting parties and takes arbitration action against those who are found to be violating human rights and in the peacebuilding stages, UNOCI conducts human rights monitoring, reconciliation of political and economic conditions, supervision of border areas, and disarms of rebels

Keywords: *UNOCI, Role, Conflict of Cote D'Ivoire 2010-2011*

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional, konflik terus menjadi wacana atau isu yang cukup penting, tidak hanya konflik antar negara seperti yang terjadi antara Israel-Palestina, atau Korea Utara-Korea Selatan, namun juga yang terjadi di dalam suatu negara (Konflik Internal), seperti misalnya yang terjadi di Libya, Suriah, Mesir, dan Sudan. Konflik merupakan suatu hal yang luas dan melingkupi berbagai kawasan di dunia, salah satunya adalah Afrika. Afrika merupakan benua dengan tingkat kemajuan dan pembangunan masyarakat yang terendah di mata dunia. Berbagai konflik kerap terjadi dalam kawasan ini, baik berupa konflik internal maupun konflik antar negara-negara di dalamnya. Salah satu negara di benua Afrika yang juga tidak terlepas dari konflik adalah Pantai Gading. Konflik politik di Pantai Gading atau dalam pemberitaan internasional seringkali disebut sebagai *Cote d'Ivoire Crisis* yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011.

Sumber konflik Pantai Gading bermula pada masa pemerintahan Presiden Henri Konan Bedie yang menanamkan sifat-sifat diskriminasi atau xenophobia terhadap orang-orang yang bukan asli keturunan Pantai Gading selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1999 terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Robert Guei terhadap Presiden Henri Konan Bedie. Pada Oktober tahun 2000 diselenggarakan pemilu presiden dimana yang menjadi kandidat presiden adalah Robert Guei dan

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

Laurent Gbagbo. Alasanne Ouattara yang juga ikut maju sebagai kandidat didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung karena Alasanne Ouattara diduga merupakan keturunan Burkina Faso dan bukan keturunan asli Pantai Gading. Hal ini sudah sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang mengatur tentang pemilihan presiden yang telah direformasi pada saat Robert Guei menjadi Presiden. Pemilu ini berhasil dimenangkan oleh Laurent Gbagbo. Pada tahun 2002 Pantai Gading mengalami perang saudara untuk yang pertama kalinya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya kelompok pemberontak dari bagian utara yang menamakan diri sebagai *New Forces* yang menentang kepemimpinan Presiden Laurent Gbagbo. Pemberontakan meningkat menjadi pemberontakan skala penuh yang menyuarakan protes warga di bagian utara yang merupakan mayoritas masyarakat muslim bahwa mereka terdiskriminasi dalam perpolitikan negara. Konflik ini mengakibatkan banyaknya penduduk Pantai Gading yang mengungsi ke negara-negara tetangga dan banyak menimbulkan masalah-masalah baru di negara yang ditempatinya seperti pencurian, perkelahian, dan pemerkosaan.

Akibat dari adanya konflik internal di Pantai Gading, dunia internasional turun tangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Perancis, Amerika, bahkan PBB turun tangan memberikan bantuan diplomatik dan finansial. *Economic Community of West African States* (ECOWAS) pun melakukan intervensi militer mengingat banyaknya korban yang telah berjatuhan. Perjanjian damai kemudian berhasil dilakukan dengan adanya Perjanjian Linas-Marcoussis yang ditandatangani oleh Perancis selaku perantara. Pada bulan Mei tahun 2003 PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1479 memberikan mandat kepada *United Nations Mission in Côte d'Ivoire* (MINUCI) untuk melaksanakan misi perdamaian di Pantai Gading yang bertugas untuk memfasilitasi implementasi dari Perjanjian Linas-Marcoussis yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Pantai Gading. Mandat MINUCI sendiri berakhir pada tanggal 4 April 2004. Kemudian peran MINUCI digantikan oleh United Nations Operation in Côte d'Ivoire atau UNOCI. UNOCI didirikan dengan tujuan untuk melakukan misi perdamaian lanjutan pasca berakhirnya mandat MINUCI, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan perjanjian perdamaian oleh pihak-pihak yang bertikai, menjaga kestabilan keamanan di daerah Pantai Gading, menjaga jalur transportasi pengiriman barang dan bantuan serta mencegah terjadinya konflik muncul kembali (www.un.org, diakses pada 16 Desember 2015).

Pada tahun 2010 Pantai Gading melaksanakan pemilihan presiden. Laurent Gbagbo yang menjabat sebagai Presiden Pantai Gading bersaing dengan mantan Perdana Menteri dan juga pemimpin partai oposisi, Alassane Ouattara. Ketua Komisi Pemilihan Independen atau *Independent Electoral Commission* (IEC), mengumumkan hasil sementara pemilu dengan kandidat Alessane Ouattara sebagai pemenangnya dengan mengumpulkan 54,1% suara. Namun Laurent Gbagbo tidak menerima hasil tersebut dengan menuding bahwa kubu Ouattara melakukan kecurangan. Setelah itu, Dewan Konstitusi Pantai Gading (Côte d'Ivoire's Constitutional Council) yang pro terhadap Gbagbo mengumumkan Gbagbo sebagai pemenang setelah membatalkan hasil suara dari beberapa wilayah utara. Berdasarkan pengumuman dari Dewan Konstitusi maka hasil pemilu berubah menjadi 51,9% suara untuk kemenangan Gbagbo (Nicolas Cook, 2011:2).

Pada Tanggal 3 Desember 2010, Pejabat Kepala UNOCI, mengesahkan hasil pemilu putaran kedua sebagaimana yang diumumkan oleh IEC dan mengkonfirmasi kemenangan Ouattara sebagai presiden tanggal 3 Desember 2010. Sehari setelahnya, baik Laurent Gbagbo maupun Alassane Ouattara melakukan sumpah jabatan dan dilantik sebagai presiden. Gbagbo dilantik di depan Dewan Konstitusi dan Ouattara melantik dirinya melalui surat yang ditujukan kepada Dewan Konstitusi dan surat pengesahan dari Kepala UNOCI.

Pasca pelantikan, baik Gbagbo maupun Ouattara membentuk kabinet di pemerintahan masing-masing. Perpecahan ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada bentrokan bersenjata antara loyalis Ouattara yang mayoritas penduduk bagian utara dan pendukung Gbagbo di bagian selatan. Akibat dari konflik ini banyak masyarakat sipil menjadi korban yang kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga dan banyak menimbulkan masalah-masalah baru di negara yang ditempati seperti pencurian, perampokan, dan perebutan wilayah tempat tinggal.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Organisasi Internasional

Menurut Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr., Organisasi Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (T. May Rudy, 2009:2).

Berdasarkan kegiatan administrasinya organisasi internasional terbagi 2, yaitu International Governmental Organization (IGO) yaitu organisasi antar pemerintah yang anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili sebuah negara secara resmi dan International Non-Governmental Organization (INGO) yaitu organisasi internasional yang anggotanya bukan pemerintah, dapat berupa kelompok atau individu dari beberapa negara. Seperti Redcross dan Greenpeace (Leroy Bennet, 1995:9).

Clive Archer lebih lanjut membahas peran organisasi internasional. Peran organisasi internasional sendiri menurut Clive archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen (Clive Archer, 1992:68-79). Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai aktor independen, Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Dari ketiga kategori peran utama organisasi internasional diatas, eksplorasi dan analisis yang dilakukan oleh organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranan yang lebih aplikatif dilakukan oleh organisasi internasional, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator. Lebih lanjut, penjelasan peranan organisasi internasional adalah sebagai berikut (Situmorang dalam Andres Pareira, 1999:135).

1. ***Inisiator***. Sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerja sama serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerja sama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat/komunitas hingga individu.

2. ***Fasilitator***. Sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi internasional itu sendiri.

3. ***Determinator***. Peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah.

4. ***Sebagai mediator/rekonsiliator***, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di antara anggotanya.

Teori Konflik

Konflik adalah proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Menurut K.J Holsti konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Bentuk konflik biasanya teridentifikasi oleh suatu kondisi sekelompok manusia yang di dalamnya terdiri dari suku, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial yang berbeda-beda (K.J. Holsti, 1988:169).

Dalam konteks hubungan internasional, konflik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *external conflict* (konflik eksternal) dan internal conflict (konflik internal). Pemisahan jenis konflik ini berdasarkan tingkatan dari konflik tersebut, dimana lebih ditekankan dari negara yang terlibat. *External conflict* melibatkan lebih dari satu negara sedangkan *internal conflict* terjadi dalam suatu negara. Konflik kontemporer tidak hanya terjadi antar negara di dunia, melainkan di dalam suatu negara yang merefleksikan melemahnya struktur negara, runtuhnya kedaulatan dan ikatan lokal dalam sistem negara. Sedangkan menurut Jhon Galtung, ada dua jenis macam konflik, yaitu asymetric conflict dan symmetric conflict. *Asymmetric conflict* merupakan konflik yang terjadi antara aktor yang memiliki power yang tidak seimbang, seperti konflik antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas atau antara pemerintah dan kelompok separatis. *Symmetric conflict* merupakan konflik diantara dua aktor yang memiliki perbedaan sumberdaya yang signifikan (Oliver Ramsbotham, dkk, 2011:10). Lebih lanjut Galtung menjelaskan bahwa dalam resolusi konfliknya harus diikuti dengan perubahan yang memperhatikan eskalasi konflik serta upaya transformasi hubungan dan kepentingan yang bertabrakan antara aktor-aktor yang berkonflik.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas

dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik, yaitu :

1. ***Peacekeeping*** adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. ***Peacemaking*** adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan.

3. ***Peacebuilding*** adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan negative peace (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif (Yulius P. Hermawan, 2007:93).

Metodologi Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana peran UNOCI dalam penyelesaian konflik di Pantai Gading pada tahun 2010-2011, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitik, dimana peneliti menjelaskan jelas dan konkrit mengenai Upaya UNOCI dalam menyelesaikan konflik di Pantai Gading. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang telah dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan.

Hasil Penelitian

Konflik di Pantai Gading

Setelah mendapat kemerdekaan dari Perancis tahun 1960 Pantai Gading dipimpin oleh Felix Houphouet-Boigny. Di bawah kepemimpinan Houphouet-Boigny Pantai Gading menjadi negara yang makmur dan sepi dari konflik, salah satunya karena Houphouet-Boigny berhasil menghapus setiap bibit perpecahan antar golongan dengan pemerintahan tangan besi dimana terdapat ketidakbebasan pers dan berkuasanya satu partai. Pada tahun 1993 Houphouet-Boigny meninggal dunia sehingga masa kepemimpinannya yang telah berlangsung selama 33 tahun berakhir. Setelah Houphouet-Boigny wafat mulai timbul perpecahan di Pantai Gading.Kemudian Henri Konan Bédié menggantikan Houphouët-Boigny untuk memimpin Pantai Gading. Pada bulan Oktober 1995, Bédié memenangkan pemilu ulang bersaing dengan kelompok oposisi yang terpecah dan tidak teroganisir. Kehidupan politik Bédié tegas dimana dia memenjarakan ratusan pendukung kelompok oposisi. Perekonomian semakin membaik dengan menurunnya inflasi dan penghapusan hutang luar negeri. Tidak seperti presiden sebelumnya yang berhati-hati menghindari konflik etnis dan membuka akses administrasi untuk imigran dari negeri tetangga, Bédié menekankan xenophobia untuk mengalahkan saingannya, Alassane Ouattara ketua penduduk wilayah utara dalam pemilihan presiden selanjutnya. Ouattara merupakan penduduk berkebangsaan asing dan merupakan bagian terbesar populasi penduduk utara (www.edition.cnn.com, daikses 6 Juli 2016).

Krisis politik dan ekonomi Pantai Gading yang semakin berlarut-larut kemudian berujung pada timbulnya kudeta militer di hari Natal tahun 1999 yang dipimpin oleh Jenderal Robert Guei. Pasca kudeta militer, Guei membentuk pemerintahan sementara dan merencanakan pemilu nasional di tahun 2000. Namun, masalah muncul ketika Mahkamah Agung (MA) Pantai Gading yang para anggotanya ditunjuk oleh Guei melarang Alassane Ouattara menteri yang beragama islam di era rezim Houphouet-Boigny untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada yang akan dilaksanakan pada tahun 2000.

Pada 18 September 2002, sekitar 800 orang yang umumnya merupakan pendukung Jenderal Guei yang kehilangan kekuasaannya pasca pemilu tahun 2000 melakukan serangan mendadak ke kota-kota di Pantai Gading salah satunya Abidjan, kota terbesar Pantai Gading untuk menggulingkan pemerintahan berkuasa (www.globalsecurity.org, diakses 6 Juli 2016). Seiring terjadinya pertempuran, pasukan loyalis berhasil mendesak mundur pasukan pemberontak keluar dari Abidjan sehingga percobaan kudeta pun berakhir dengan kegagalan.

Pada pertengahan Oktober 2002, saat konflik bersenjata masih berjalan, terjadi perundingan antara pihak-pihak yang bertikai. Hasilnya, pasca perundingan yang dilakukan di Paris, Perancis, pada bulan Januari 2003, Presiden Gbagbo dan kelompok-kelompok pemberontak Pantai Gading Mouvement Patriotique de la Cote d"Ivoire (MPCI), Movement for Justice and Peace (MJP), dan Ivorian Popular Movement of the Great West (MPIGO) sepakat untuk berhenti berperang dan mendirikan pemerintahan bersama. Kesepakatan tersebut juga menjamin Presiden Gbagbo akan tetap menjabat sebagai presiden dan pemegang posisi perdana menteri akan ditentukan melalui pemilu (www.globalsecurity.org, diakses 6 Juli 2016). Masa damai di Pantai Gading tidak berlangsung lama, setelah bulan Juli 2003, kelompok pemberontak memutuskan untuk kembali mengangkat senjata dan menggabungkan diri menjadi kelompok pemberontak baru yang bernama *Forces Nouvelles* atau *New Forces*. NF terbentuk setelah Presiden Gbagbo ingin menjadikan orang-orang loyalnya sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan yang baru tanpa berkonsultasi dengan para perwakilan kelompok pemberontak di parlemen.

Konflik Pasca Pemilihan Presiden 2010

Pemilu presiden tahun 2010 merupakan tujuan politik utama dari proses perdamaian yang ditujukan untuk menyatukan kembali Pantai Gading di bawah serangkaian kesepakatan politik-militer yang dicapai antara tahun 2003 dan 2007, setelah *Ouagadougou Political Agreement* (OPA) ditandatangi pada 4 Maret 2007. Pemilu ini pada awalnya dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2005 sebagai ketentuan konstitusional, dengan cara yang dapat memungkinkan adanya transisi pada pemerintah terpilih yang baru setelah masa akhir pemerintahan satu periode pertama Presiden Gbagbo. Pelaksanaan pemilu putaran pertama pada 31 Oktober 2010 dimungkinkan karena kemajuan subtansial yang dibuat pada tahun 2009 dan 2010 terhadap penyelesaian perjanjian OPA yang membutuhkan persiapan pemilihan umum. Menurut laporan PBB, identifikasi warga negara dan proses pendaftaran pemilih pada tahun 2009 memberikan hasil Lebih dari 6,59 juta orang secara hukum diidentifikasi dan 6,38 juta orang terdaftar sebagai pemilih, namun 2,7 juta dari

jumlah ini harus memiliki surat konfirmasi identifikasi untuk tujuan hak memilih mereka (www.securitycouncilreport.org, diakses 27 Juli 2016).

Pantai Gading mengadakan pemilihan umum kepresidenan putaran kedua pada tanggal 28 November 2010 untuk memilih antara Laurent Gbagbo (presiden yang sedang menjabat) dan Alassane Ouattara, keduanya merupakan kandidat utama yang telah memenangkan suara terbanyak dalam pemilu putaran pertama pada tanggal 31 Oktober 2010. Komisi Pemilihan Independen Pantai Gading mengumumkan hasil pemilu bahwa Ouattara mengumpulkan suara sebanyak 54,1% dan Gbagbo mengumpulkan 45,9% suara. Hasil ini didukung oleh pihak-pihak internasional sebagai hasil yang akurat dan meminta kepada Gbagbo untuk menerima kekalahan. Namun, Gbagbo tidak mau mengakui kekalahannya dan menuding Ouattara melakukan kecurangan. Gbagbo kemudian mengajukan banding kepada Dewan Konstitusi Pantai Gading. Gbagbo dan sekutunya berhasil memprovokasi Dewan Konstitusi yang kemudian membatalkan hasil yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Independen. (Nicolas Cook, 2011:2).

Hasil pemilu yang diperebutkan oleh kedua kubu telah meningkatkan ketegangan politik dan memicu kekerasan politik, termasuk dengan banyaknya korban pembunuhan yang dimulai pasca perebutan kekuasaan, hal ini menempatkan Gbagbo dan pasukannya untuk bertentangan dengan pasukan penjaga perdamaian, Dewan Keamanan PBB, organisasi regional, dan beberapa negara yang terlibat untuk membantu proses perdamaian di Pantai Gading. Pada konflik pasca pemilu 2010 ini, konflik antara Ouattara dan Gbagbo melibatkan *Nouvelles Forces* yang mendukung Ouattara sebagai pemenang pemilu, sedangkan Gabgbo didukung kelompok paramiliter FPI, *Jeunes Patriots* (www.theguardian.com, diakses 27 Juli 2017). Kekerasan terus meningkat sepanjang bulan Januari 2011 dimana pasukan Gbagbo terus menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap pendukung Presiden Ouattara. Pada tanggal 4 Januari, pasukan Gbagbo menyerang markas besar Partai Demokratis Pantai Gading (*Parti démocratique de Côte d'Ivoire*) yang mengakibatkan satu orang tewas, beberapa orang cedera dan 136 orang ditangkap. Pada tanggal 11 Januari 2011, pasukan Gbagbo melakukan penyerangan di wilayah Abobo di Abidjan yang menewaskan sedikitnya tiga warga sipil. Situasi kekerasan meningkat pada bulan Maret ketika pasukan keamanan yang setia kepada Gbagbo menggunakan senjata berat untuk membubarkan unjuk rasa. Pada tanggal 3 Maret 2011 di Abobo, mereka menggunakan senjata mesin berat terhadap sekelompok wanita yang melakukan demonstrasi damai untuk mendukung Presiden Ouattara, kejadian ini menewaskan tujuh orang dan banyak korban luka. Hal ini mengakibatkan terjadinya bentrok pada tanggal 8 Maret antara pasukan keamanan Gbagbo dan pasukan bersenjata Ouattara yang menyerang karena kemarahan atas serangan terhadap demonstrasi damai yang dilakukan sekelompok wanita pada tanggal 3 Maret 2011.

PBB melaporkan bahwa telah terjadi 173 eksekusi kematian di luar pengadilan hukum yang terjadi sejak tanggal 16 hingga 21 desember 2010. PBB juga melaporkan 90 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk, 471 kasus penangkapan dan penahanan dan 24 kasus penculikan dalam periode yang sama. Sebuah tambahan 31 kasus kematian akibat kekerasan terjadi antara periode 21 Desember 2010 sampai 6 Januari 2011,

walaupun tidak diberitakan secara jelas keseluruhan kasus kematian ini berhubungan dengan krisis pasca pemilu atau tidak. Pada tanggal 11 Januari, dua warga sipil dan tiga polisi dilaporkan tewas dalam serangan terhadap lingkungan pro-Ouattara di kawasan Abobo di Abidjan, dan pada tanggal 14 Januari 2011 PBB melaporkan jumlah total korban kekerasan dalam krisis pasca pemilu adalah 247 jiwa (www.un.org, diakses 28 Juli 2016). Sementara jumlah korban jiwa dan pelanggaran yang sesungguhnya mungkin lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan oleh PBB, dimana jumlah pembunuhan, penangkapan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sebelum dan setelah periode tersebut belum dimasukkan.

Peran UNOCI dalam menangani konflik Pasca pemilihan Presiden di Pantai Gading Tahun 2010-2011

Peran UNOCI dalam Tahap Peacekeeping

Pasca pengumuman hasil pemilihan presiden pada tanggal 2 Desember 2010, pasukan keamanan yang pro pada Gbagbo beserta dengan para pendukung militannya dan kelompok yang terkait dengan partai politiknya, melakukan serangan kekerasan terhadap masyarakat yang mereka yakini sebagai bagian dari pendukung kandidat presiden Ouattara di beberapa wilayah ibukota Pantai Gading, Abidjan. Para pendukung dan pasukan militansi yang pro pada Gbagbo mulai membuat penghalang jalan dan menyebarkan pasukan bersenjata berat di sekitar Hotel Golf dimana kandidat Presiden Ouattara berada beserta dengan presiden Komisi Pemilihan Independen, dan pemimpin-pemimpin politik yang pro pada Ouattara.

Untuk meredam konflik yang terjadi, pada tanggal 7 Desember Tahun 2010, UNOCI bersama dengan ECOWAS dan African Union mengajukan permasalahan konflik sipil serius yang terjadi di Pantai Gading untuk dibahas di Dewan Keamanan PBB. Usulan terkait permasalahan konflik yang terjadi dibawa oleh perwakilan UNOCI ke DK PBB. Sebagai bentuk respon terhadap situasi keamanan yang sangat tidak kondusif dan memburuk, pada tanggal 20 Desember 2010 DK PBB mengeluarkan Resolusi S/RES/1962 yang pada intinya meminta Sekretaris Jenderal UNOCI memfasilitasi dialog politik antara pihak Gbagbo dan pihak Ouattara untuk memastikan perdamaian di Pantai Gading dan saling menghormati terkait hasil pemilihan Presiden yang diakui oleh ECOWAS, Uni Afrika dan UNOCI (UN, 2010:3)

Perpanjangan mandat UNOCI di Pantai Gading juga menandai dimulainya peranan UNOCI untuk melaksanakan tahapan awal dalam penyelesaian konflik menurut Galtung, yaitu peacekeeping. Hal ini dapat dilihat dari isi mandat S/RES/1962 poin 6, 15, dan 16 yang pada intinya DK PBB memutuskan bahwa UNOCI berhak menggunakan kekuatan militer untuk melindungi masyarakat sipil dana menjaga keamanan di Pantai Gading (UN, 2010:3-4).

Dalam pelaksanaan peran peacekeeping, UNOCI selain mengadopsi Resolusi DK PBB S/RES/1962, juga mengadopsi resolusi DK PBB S/RES/1967. Resolusi DK PBB tersebut bermula pada KTT ke 39 ECOWAS pada 24 Maret 2011 dimana ECOWAS menyarankan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat mandat UNOCI guna mengaktifkan misi "menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk melindungi dan untuk memfasilitasi keamanan dan penguatan penjagaan terhadap Mr.

Alassane Ouattara, serta untuk memperkuat sanksi yang terhadap kelompok Gbagbo (www.un.org diakses pada tanggal 20 September 2016).

Dalam menjalankan peran peacekeeping, UNOCI mendapat beberapa dukungan. Ketika situasi yang semakin memanas di Pantai Gading mendorong Dewan Keamanan PBB meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk mengalihkan sebagian kekuatan dari United Mission in Liberia (UNMIL) kepada UNOCI untuk memperkuat pertahanan UNOCI dari serangan yang dilakukan oleh pasukan Gbagbo. Pada akhir November tahun 2010 Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memindahkan beberapa pasukan UNMIL ke UNOCI untuk jangka waktu empat minggu dengan maksimal tiga kompi infantri dan unit penerbangan yang terdiri dari dua helikopter militer (UN Resolution 1951, 2010:1). Mandat ini kemudian diperpanjang pada resolusi 1962 (2010) untuk beroperasi hingga empat minggu tambahan bantuan dengan kapasitas yang sama seperti sebelumnya dari UNMIL ke UNOCI (UN Resolution 1962, 2010:3).

Peran UNOCI dalam Tahap Peacemaking

Peranan UNOCI dalam tahapan peacemaking dapat dilihat dari upaya UNOCI yang menggunakan pendekatan persuasif dalam salah satu cara untuk menyelesaikan konflik di Pantai Gading pada tahun 2010-2011. UNOCI juga melalui DK PBB menetapkan sanksi hukuman terhadap kelompok pemberontak Gbagbo yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan Hukum Kemanusian Internasional

Dalam pendekatan resolusi konflik terdapat metode penyelesaian dengan menggunakan pendekatan persuasif dan koersif. Dalam kasus konflik pasca pemilihan presiden di Pantai Gading pada tahun 2010, pendekatan persuasif digunakan oleh UNOCI bersama dengan Uni Afrika dan ECOWAS sebagai organisasi regional di kawasan tersebut. UNOCI kemudian berinisiatif dengan menawarkan untuk menjadi tempat bagi pihak-pihak yang berkonflik dalam pemilihan presiden maupun bagi organisasi internasional lain seperti ECOWAS dan Uni Afrika untuk membahas dan berdialog guna mencari solusi dari konflik yang terjadi. Hal inilah yang merupakan bentuk dari keterlibatan UNOCI dalam peranannya sebagai inisiator dalam penanganan konflik di Pantai Gading. Sebagai inisiator dalam penanganan konflik di Pantai Gading, tentu UNOCI tidak bisa bekerja secara sendiri. UNOCI harus berkolaburasi atau bekerja sama dengan negara-negara lain maupun dengan organisasi internasional lain dalam upayanya untuk menghentikan konflik atau minimal meredam konflik di Pantai Gading agar tidak semakin berkepanjangan.

Pelaksanaan mediasi dan upaya diplomasi oleh Uni Afrika dan ECOWAS ini difasilitasi oleh UNOCI. Pelaksanaan mediasi pada rentang 5-24 Desember 2010 ini mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, terutama dari kubu Outtara dan Gbagbo (UN Report, 2010:9-9). Namun karena tidak ada titik temu karena pihak Gabgbo tidak mau menerima hasil Pemilihan Presiden yang memenangkan Outtara. Penolakan Gabgbo ini kemudian diikuti dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak Gbagbo yang didukung oleh pihak militer Pantai Gading, khsuusnya militer yang loyal pada Gabgbo. Hal ini disebabkan karena Gbagbo merupakan calon presiden petahana yang masih memegang kekuasaan yang cukup kuat di militer Pantai Gading. Setelah semua upaya perdamaian melalui pendekatan diplomasi dan

mediasi yang dilakukan oleh Uni Afrika dan ECOWAS gagal dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, PBB tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan konflik selain dengan menggunakan pendekatan koersif yang bertujuan untuk menekan intensitas konflik yang terjadi.

Pada tahun 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi S/RES/197 yang pada intinya adalah menetapkan target sanksi kepada beberapa individu yang dianggap melanggar Resolusi DK PBB di tahun 2004 mengenai pemeliharaan perdamaian di Pantai Gading. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang bersalah (kriteria ini telah ditetapkan pada mandat-mandat setelah tahun 2004), termasuk orang-orang yang menghalangi perdamaian dan rekonsiliasi di Pantai Gading, menghambat operasi UNOCI dan melakukan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan Internasional. Berikut adalah daftar target yang akan dikenakan sanksi berat oleh PBB menurut Resolusi 1975, karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang terjadi di Pantai Gading:

Tabel 1. Daftar Nama-Nama target Sanksi Oleh DK PBB

NO	Name	Place of Birth	Date of Birth	Explanation
1	Laurent Gbagbo	Gagnoa, Côte d'Ivoire.	31 May 1945	Former President of Côte d'Ivoire: obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election.
2	Simone Gbagbo	Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire.	20 June 1949	Chairperson of the Parliamentary Group of the Ivorian Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence.
3	Desire Tagro	Issia, Côte d'Ivoire.	27 January 1959	Secretary-General in the so-called "presidency" of Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo,

				obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election, participation in violent repressions of popular movements.
4	Pascal Affi N'Guessan	Bouadriko, Côte d'Ivoire.	1 January 1953	Chairman of the Ivorian Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, incitement to hatred and violence.
5	Alcide Djedje	Abidjan, Côte d'Ivoire.	20 October 1959	Close advisor to Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence.

Sumber : Resolusi 1975 Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2011.

Pada tanggal 11 April 2011, *Forces Républicaines de Côte d'Ivoire* (FRCI) berhasil menangkap Gbagbo beserta anggota keluarganya dan juga staf kabinet pemerintahan versi Gabgbo di sebuah bunker di kediaman presiden. FRCI mendapat bantuan pasukan dari UNOCI dan tentara bantuan Perancis dalam upayanya menangkap Gbagbo. Pada 5 Desember 2011, Gbagbo diadili di *International Criminal Court* (ICC) akibat dari pemberontakan yang dilakukannya terhadap hasil pemilu di Pantai Gading pada tahun 2010. Seminggu sebelumnya Gbagbo diekstradisi ke Belanda untuk menghadapi tuntutan atas tindakan pendukungnya yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan selama periode konflik terjadi. Jaksa penuntut melaporkan sekitar 3.000 orang tewas dalam kekerasan yang terjadi selama krisis (David Smith, www.theguardian.com, diakses pada 30 September 2016).

Peran UNOCI dalam Tahap Peacebuilding

Selain berperan dalam penanganan konflik dan pengerahan pasukan bersenjata dalam menghadapi pasukan militan pro Gbagbo (tindakan peacekeeping), UNOCI juga melakukan peran sebagai rekonsiliator pasca konflik dengan cara memberikan perlindungan terhadap warga sipil, melakukan fasilitasi bantuan kemanusiaan di

wilayah-wilayah yang terdampak konflik di Pantai Gading, serta melakukan upaya peacebuilding pasca konflik mulai mereda.

UNOCI telah membentuk suatu badan pemantauan terpadu untuk investigasi pemantauan Hak Asasi Manusia dan membuka layanan *call center* 24 jam untuk menerima informasi tentang dugaan pelanggaran maupun pengaduan atas kejahatan HAM. Sejak didirikan pada tanggal 15 Desember hingga akhir maret 2011, *call center* tersebut telah menerima lebih dari 9.000 panggilan, yang jika dirata-ratakan, 100 panggilan diterima setiap harinya. UNOCI juga memfasilitasi akses-akses bantuan kemanusiaan untuk para korban dan telah memberikan perawatan medis gratis untuk 1.228 pasien dan telah mendistribusikan 22.100 liter air minum kepada penduduk sipil (UN, 2011:14). Dengan adanya fasilitas bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh UNOCI, maka organisasi atau LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan bisa beroperasi dengan lancar karena dilindungi oleh pasukan UNOCI. Hal ini juga membuat banyak korban dari warga sipil yang tidak tahu apa-apa mengenai konflik dapat tertolong nyawanya. Adanya konflik juga membuat akses warga terhadap sumberdaya menjadi terbatas. Warga sulit untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok seperti air, makanan, dan pertolongan medis. Hal inilah yang menjadi perhatian utama UNOCI dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Pantai Gading dengan cara memeberikan perlindungan dan memeberikan rasa aman.

Untuk Upaya *Peacebuilding* yang dilakukan UNOCI, sejak pertengahan April 2011, UNOCI memulai patroli bersama dengan FRCI. UNOCI dan FRCI berkeliling di wilayah-wilayah yang dianggap menjadi tempat bagi sisa-sisa pasukan Gbagbo bersembunyi dan masih menyimpan senjata mereka. UNOCI membantu dalam mengumpulkan dan mendaftar sekitar 500 senjata, termasuk senjata berat dan 65.000 butir amunisi. UNOCI juga membersihkan bom-bom yang belum meledak di sekitar wilayah Abidjan. UNOCI dan FRCI juga berhasil menangkap sekitar 800 orang dari pasukan pro Gbagbo melucuti senjatanya. Hanya sekitar 30 senjata yang masih berguna dan amunisi dalam jumlah terbatas yang diserahkan kepada UNOCI (UN, 2011:3). UNOCI juga melakukankerja sama dengan *United Nations Missions in Liberia* (UNMIL) untuk menjaga daerah perbatasan antara Liberia dan Pantai Gading. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya kegiatan penyelundupan senjata dan akses transfer senjata kepada pihak militan pro Gbagbo yang masih bersembunyi di Pantai Gading. Adanya kegiatan patroli dan penjagaan daerah perbatasan yang dilakukan oleh UNOCI membuat siatuasi damai di Pantai Gading mulai bisa dirasakan oleh masyarakat sipil. Masyarakat dapat kembali melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari tanpa ada rasa was-was dan takut akan ancaman konflik bersenjata seperti ketika pasca pemilihan presiden di tahun 2010 lalu.

Ketika situasi perlahan mulai stabil, pemerintah Pantai Gading dibawah pimpinan Presiden Ouattara mengambil sejumlah inisiatif untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi di Pantai Gading. Presiden Ouattara telah menunjuk Gubernur baru untuk Abidjan dan Yamoussoukro pada tanggal 28 April 2011. Pada tanggal 12 Mei 2011 Ouattara juga mengganti pejabat senior lainnya, termasuk dua anggota Dewan Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Ekonomi dan Sosial. Pada tanggal 1 Juni 2011, Presiden Ouattara mengumumkan pemerintahan barunya yang

dipimpin oleh Perdana Menteri Soro dan terdiri dari 36 menteri. Pemerintahan meliputi 127 anggota dari Partai Politik Ouattara yaitu *Rassemblement des républicains* (RDR), 76 anggota dari partai *Parti démocratique de Côte d'Ivoire* (PDCI), 3 anggota dari *Forces Nouvelles* dan sisanya diisi oleh partai-partai kecil serta independen. Sementara Partai *Front Popular Ivorian* yang sebelumnya dipimpin oleh Gbagbo menolak tawaran untuk bergabung dengan Pemerintah. Presiden Ouattara selanjutnya memimpin pertemuan pertama Dewan Menteri pada tanggal 8 Juni 2011 (www.ipu.org).

Kegiatan pemulihan ekonomi dilakukan pemerintahan Ouattara dengan membuka kembali sekitar 20 bank yang dimulai dari wilayah Abidjan untuk memberikan pelayanan keuangan terhadap para masyarakat sipil dan investor. Pada tanggal 13 April 2011, Presiden Ouattara mengumumkan dimulainya kembali produksi ekspor kakao, hal ini diikuti dengan pencabutan sanksi larangan ekspor kakao oleh Uni Afrika pada tanggal 21 April 2011 dan pencabutan sanksi oleh Uni Eropa pada 29 April 2011. Dengan adanya pencabutan sanksi, maka keadaan ekonomi di Pantai Gading mulai terlihat membaik dan masyarakat sipil bisa melakukan kegiatan ekonominya tanpa adanya gangguan dan ancaman keamanan lagi.

Pada tanggal 29 Juni 2011, Dewan keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1992 yang berisi perintah untuk mempertahankan 200 pasukan tambahan personil yang diutus pada mandat sebelumnya untuk tetap berada di Pantai Gading sampai pada mandat UNOCI yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2011. Namun pada tanggal 27 Juli 2011, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk kembali memperpanjang mandat UNOCI hingga 31 Juli 2012. Dengan adanya tambahan mandat hingga pada pertengahan tahun 2012, UNOCI memiliki peran yang besar dalam membantu pemerintah nasional Pantai Gading yang dipimpin oleh Alassane Ouattara untuk mensatbilkan keamanan dengan fokus wilayah Abidjan dan bagian barat Pantai Gading serta daerah perbatasan.

Dengan adanya tambahan mandat hingga pada pertengahan tahun 2012, UNOCI memiliki peran yang besar dalam membantu pemerintah nasional Pantai Gading yang dipimpin oleh Alassane Ouattara untuk menstabilkan keamanan dengan fokus wilayah Abidjan dan bagian barat Pantai Gading serta daerah perbatasan. Bagian barat Pantai gading ini merupakan wilayah yang dulunya merupakan basis kekuatan dari pendukung Laurent Gbagbo. UNOCI meningkatkan patroli bersama dengan FRCI, polisi dan militer dalam memfasilitasi kembalinya tanggung jawab penegakan hukum oleh polisi dan militer, menghalangi kegiatan milisi, mantan kombatan, tentara bayaran dan kelompok bersenjata lainnya, serta tetap membantu dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil. UNOCI juga terus mengumpulkan dan mengamankan senjata, dan juga membantu dalam pembersihan sisa-sisa bahan peledak yang digunakan selama masa konflik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis upaya penanganan konflik di Pantai Gading pada tahun 2010-2011 oleh UNOCI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

UNOCI telah menjalankan mandat-mandatnya sampai pada enam tahun keberadaannya di Pantai Gading. Tingkat keberhasilan mandat tersebut dicapai secara maksimal dan dibuktikan dengan terjaganya situasi dan perdamaian yang telah disepakati sehingga dalam rentang tahun 2004 hingga 2010 sebelum pemilihan presiden dilakukan, hampir tidak ada konflik serius yang terjadi.

Peran UNOCI Peran UNOCI dalam penyelesaian konflik dapat dilihat dari tiga tahapan penyelesaian konflik menurut Galtung, yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Dalam peran *peacekeeping*, UNOCI menggunakan mandatnya untuk mengamankan situasi keamanan dengan menggunakan pendekatan koersif atau intervensi militer. Pendekatan ini dilakukan untuk menekan intensitas konflik yang terjadi. Pada tahapan *peacekeeping*, UNOCI mendapatkan hambatan berupa pasukan pendukung Gbagbo yang melancarkan serangkaian serangan kepada personil UNOCI yang sedang berpatroli maupun yang sedang mengamankan wilayah-wilayah pemukiman warga sipil.

Pada tahapan *peacemakin*g, peran UNOCI dalam memediasi konflik sudah maksimal namun menemui kegagalan karena dalam proses mediasi, kubu Gbagbo tetap tidak mau menerima hasil pemilu yang sah dan terus melakukan tindakan kekerasan melalui pasukan-pasukan militer yang loyal padanya. Pada tahapan ini juga, UNOCI melalui DK PBB melakukan upaya arbitrase atau proses pengajuan hukuman terhadap kelompok Gbagbo yang terbukti telah melakukan pelanggaran HAM dan Hukum Kemanusiaan Internasioanl yang berujung pada dihukumnya Gabgbo dan para loyalisnya pada tahun 2011

Pada tahapan *peacebuilding*, peran UNOCI terlihat dalam tugas tugas yang dilaksanakannya sesuai dengan mandatnya yaitu memberikan perlindungan terhadap warga sipil, melakukan fasilitasi bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik di Pantai Gading, membentuk bdan pemantauan terpadu untuk masalah HAM, melakukan pelucutan senjata dan pengurangan kekerasan dalam proses rekonsiliasi dan revitalisasi kegiatan ekonomi, menjaga daerah perbatasan, dan membantu kegiatan pemulihan ekonomi Pantai Gading di bawah pemerintahan Outtara.

Saran

1. Pemerintahan Pantai Gading harus mandiri dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam wilayah, serta menjaga persatuan antara kelompok-kelompok masyarakat di dalam negerinya agar tidak terjadi lagi konflik-konflik yang mengundang intevensi pihak internasional karena UNOCI tidak selamanya berada di Pantai Gading.
2. UNOCI dan UNMIL harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menjaga perbatasan Pantai Gading dan Liberia agar bisa mengawasi dan melakukan penjaggan ketat di perbatasan agar dapat mencegah akses-akses senjata dan migrasi ilegal.
3. Kurangnya surat identifikasi untuk jutaan penduduk Pantai Gading dan penduduk asing di Pantai Gading merupakan kunci masalah yang mendasari konflik pasca pemilu yang terjadi. Hal ini juga termasuk kurangnya bukti identitas nasional karena faktor-faktor diskriminasi sejarah, kurangnya kapasitas administrasi,

kurangnya akses penduduk kelahiran lokal namun keturunan dari luar (imigran generasi kedua) untuk identifikasi hak dan proses hukum, dan administrasi yang buruk dari registrasi warga sipil.

Daftar Pustaka

Archer, Clive. 1992. *International Organizations.* New York dan London: Routledge.

Bennet, Leroy. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Cook, Nicolas. 2011. *Cote i'Divore's Post-Election Crisis*. Washington DC: Congressional Research Services.

Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Holsti, K.J. 1988. *International Politic*. Terjemahan. M. Tahrir Azhary. Jakarta: Erlangga.

Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse dan Hugh Miall. 2011. *Contemporary Conflict Resolution: Third edition*. Cambridge: Polity Press.

Rudy, T. May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional.* Bandung: Refika Aditama.

Pareira, Andre. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumber Internet

"CNN, *What's causing the conflict in Ivory Coast?*" terdapat di http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/04/03/ivory.coast.explainer/

"Global Security, *Ivory Coast Conflict 2011"* terdapat di http://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2011.htm

" *Laurent Gabgbo appears before international criminal court*" terdapat di http://www.theguardian.co.uk/world/2011/dec/05/laurent-gbagbo-international-criminal-court1

"Security Council Report, *Chronology Event Cote d'Ivoire*" terdapat di http://www.securitycouncilreport.org/chronology/cote-divoire.php?pag&page=22

"The Guardian, *Gbagbo Comes Under Attack From Ground Assault*" terdapat di https://www.theguardian.com/world/2011/apr/11/gbagbo-attack-ground-assault

”UN, *MINUCI Mandate* ” terdapat di http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/mandate.shtml

“UN, *Peacekeeping Fact Sheet*” terdapat di http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml#OCI

”UN, *UNOCI Background*” terdapat di http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/background.shtml

”UN, *UNOCI Fact and Figures*” terdapat di http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/facts.shtml